



UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA MENYIMPAN, MEMILIKI, MEMELIHARA, MEMPERNIAGAKAN SATWA DILINDUNGI SECARA ILEGAL (Studi Kasus: Polresta Surakarta)

Maria Dyah Sekar Suci¹, Supriyanta², Esti Aryani³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta/ Fakultas Hukum; Jl. Sumpah
Pemuda 18, Kadipiro,

Banjarsari, Surakarta, telp/fax: 0271-853839, e-mail: info@unisri.ac.id e

e-mail co Author: *¹mariadyah24@gmail.com

NO HP. 081228749924

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa dilindungi secara ilegal, yang melanggar undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang sumber daya alam hayati dan ekosistem. serta mengetahui kendala apa yang dihadapi dan bagaimana upaya dari aparat kepolisian Polresta Surakarta dalam mengatasi pelaku tindak pidana menyimpan, memiliki memelihara memperniagakan satwa yang dilindungi secara ilegal di Polresta Surakarta.

Latar belakang yang dipaparkan dalam penulisan skripsi ini adalah keberadaan dari para satwa ini saat ini terancam kepunahan dengan adanya kegiatan perburuan dan perdagangan satwa ilegal, di Indonesia sendiri terdapat antara lain 3.305 spesies amfibi, burung, mamalia dan reptile, Dan diantaranya 31,1% nya endemic, Celakanya dari hewan endemic tersebut 9,9% nya terancam punah. Suatu ekosistem lingkungan perlu perlindungan secara hukum karena pada dasarnya hal ini bergantung berbagai faktor seperti alam, dan manusia yang bisa mempengaruhi ekosistem itu sendiri. Sebagai contoh, tindakan manusia yang terus melakukan perburuan akan menyebabkan berkurang atau punahnya suatu hewan, yang tentu akan mengganggu ekosistem lain yang ada di dalamnya.

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan hukum deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris sumber datanya dari data primer



dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi dan data langsung dari narasumber yang diperlukan untuk bahan penelitian di Polresta Surakarta dengan Aipda Slamet Nuryanto, SH di devisi Unit 5 Sat Reskrim Polresta Surakarta - Polda Jawa Tengah, dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya data yang sudah terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa Polresta Surakarta dalam upaya menanggulangi tindak pidana terhadap menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi secara illegal yang terjadi di Surakarta, Polresta Surakarta sudah melakukan segala upaya preventif dan respresif. Polresta Surakarta sudah melakukan segala upaya preventif dan respresif. Peran Kepolisian dalam hal ini sangatlah penting dikarenakan upaya-upaya pencegahan, penangkapan, penindakan dan kerjasama dengan pihak pihak lain seperti BKSDA, Kejaksaan, LSM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Upaya penanggulangannya berupa pemberitahuan kepada masyarakat tentang pentingnya melestarikan satwa-satwa langka serta memberitahukan sanksi-sanksi apa yang akan di dapat apabila melanggar tindak pidana tersebut. Kendala yang didapatkan oleh Polresta Surakarta dikarenakan kurangnya koordinasi serta bantuan dari masyarakat setempat, kurangnya informasi himbauan untuk masyarakat dan kurangnya pengawasan. Maka upaya untuk meminimalisir pelanggaran satwa yang di lindungi secara illegal di Surakarta yaitu dengan melakukan razia, patrol, pemberian informasi kepada masyarakat sekitar secara berkelanjutan, serta meningkatkan pengawasan serta penambahan personil dalam melakukan razia.

Kata kunci : Satwa, kepolisian, kendala, upaya.

ABSTRACT

This research aims to determine the police's efforts in dealing with criminal acts of storing, owning, caring for, and trading in protected animals illegally, which violates Law Number 5 of 1990 concerning biological natural resources and ecosystems. as well as knowing what obstacles are faced and how the Surakarta police officers are trying to deal with perpetrators of criminal acts of keeping, maintaining and trading in illegally protected animals in the Surakarta police station.

The background presented in writing this thesis is that the existence of these animals is currently threatened with extinction due to illegal animal hunting and trade activities, in Indonesia alone there are 3,305 species of amphibians, birds, mammals and reptiles, of which 31.1% endemic. Unfortunately, 9.9% of these endemic animals are threatened with extinction.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



An environmental ecosystem needs legal protection because basically this depends on various factors such as nature and humans which can influence the ecosystem itself. For example, human actions that continue to hunt will cause the reduction or extinction of animals, which of course will disrupt other ecosystems in it.

The research was carried out using a descriptive legal approach method with an empirical juridical research type, the data source was primary data by conducting interviews to obtain information and data directly from sources needed for research material at the Surakarta Police with Aipda Slamet Nuryanto, SH in the Unit 5 division of the Police Criminal Investigation Unit. Surakarta - Central Java Regional Police, and secondary data by processing data from primary, secondary and tertiary legal materials. Next, the data that has been collected is analyzed qualitatively.

The results of the discussion concluded that the Surakarta Police in an effort to overcome criminal acts of storing, owning, caring for, and trading in illegally protected animals that occurred in Surakarta, the Surakarta Police had made all preventive and repressive efforts. The Surakarta Police have taken all preventive and repressive measures. The role of the Police in this matter is very important due to efforts to prevent, arrest, take action and collaborate with other parties such as BKSDA, the Prosecutor's Office, NGOs, the Ministry of Environment and Forestry. Efforts to overcome this include informing the public about the importance of preserving endangered animals and informing them of the sanctions they will receive if they violate this criminal act. The obstacles encountered by the Surakarta Police were due to lack of coordination and assistance from the local community, lack of information regarding appeals to the community and lack of supervision. So efforts to minimize violations of illegally protected animals in Surakarta include carrying out raids, patrols, providing information to local communities on an ongoing basis, as well as increasing supervision and adding personnel to carry out raids.

Keywords: *Animals, police, obstacles, efforts.*

PENDAHULUAN

Sengketa Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk flora dan fauna. Kekayaan ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Namun, kekayaan ini juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal konservasi dan perlindungan satwa liar. Banyak satwa dilindungi yang diperdagangkan secara ilegal, mengancam keberlangsungan hidup mereka.

Kegiatan perburuan dan perdagangan satwa ilegal ini telah menyebabkan beberapa spesies satwa di Indonesia menjadi langka dan terancam punah. Menurut



data, terdapat 3.305 spesies amphibi, burung, mamalia, dan reptil di Indonesia, dan 311% di antaranya adalah endemik, dengan 99% dari spesies tersebut terancam punah. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang ketat untuk menjaga kelestarian ekosistem dan satwa di Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap sumber daya alam hayati diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini bertujuan untuk melestarikan dan memanfaatkan sumber daya alam hayati secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Polresta Surakarta berperan penting dalam upaya penegakan hukum ini, dengan melakukan tindakan preventif dan represif terhadap tindak pidana yang terkait dengan perdagangan satwa dilindungi secara ilegal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Aipda Slamet Nuryanto SH dari Unit 5 Sat Reskrim Polresta Surakarta, serta pengumpulan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Lokasi penelitian dilakukan di Polresta Surakarta.

Metode yuridis empiris bertujuan untuk mengkaji secara mendalam upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polresta Surakarta dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa dilindungi. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan serta kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai upaya penanggulangan tersebut.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam terhadap narasumber kunci yang memiliki peran penting dalam penanganan kasus perdagangan satwa dilindungi. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan akurat mengenai langkah-langkah yang telah diambil, tantangan yang dihadapi, serta hasil yang telah dicapai. Selain itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk dokumen resmi, laporan, dan publikasi yang relevan dengan topik penelitian.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana terhadap menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi secara illegal.

Upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang di lindungi secara illegal, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (UU No. 5/1990) mengatur tentang perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal. Pasal 21 ayat 2 dari undang-undang ini menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dengan melakukan wawancara kepada Aipda Slamet Nuryanto, SH., selaku anggota Unit 5 Sat Reskrim Polresta Surakarta - Polda Jawa Tengah. terdapat beberapa upaya yang dilakukan Polresta Surakarta yaitu:

Upaya Preventif, adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan yang melanggar hukum, menurut Sudarto upaya preventif adalah Mencegah lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam ilmu kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Upaya Represif, juga dapat diartikan sebagai suatu konseptional yang dihadapi setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan usaha Represif adalah untuk menangani atau menindak para pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan serta menunjukkan untuk memperbaiki nya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksinya sangat berat.



Upaya Preventif yang dilakukan oleh Polesta Surakarta adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan yang melanggar hukum, seperti melakukan Patroli dan Pengawasan, Edukasi masyarakat, Penyusupan dalam Jaringan, Kolaborasi dengan Lembaga Penegak Hukum Lainnya, Pengendalian dan Pencegahan Melalui Media Pers/Media Massa, Pengendalian dan Pencegahan Melalui Aparat Penegak Hukum.

Upaya Represif yang dilakukan Polresta Surakarta lebih menekankan pada penegakan hukum, penindakan seperti penangkapan pelaku dan penyitaan barang bukti, dan pembeian sanksi yang tegas dan sepatasnya untuk memberikan efek jera kepada semua orang yang melanggar, diharapkan masyarakat menjadi lebih berempati dan mengerti betapa pentingnya menjaga kelestarian hewan-hewan langka dan dilindungi, dan membuat para pelaku jera akan perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, serta memberi efek yang menakutkan agar masyarakat takut untuk ikut-ikutan melakukan pelanggaran tersebut, seperti yang telah diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang bertuliskan bahwa:

- 1 Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- 2 Setiap orang dilarang untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

Bagi yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap pasal diatas maka bisa dipidana penjara hingga lima (5) tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah (Rp.100.000.000,00). Sedangkan bagi yang lalai melakukan pelanggaran tersebut dapat dipidana kurungan paling lama satu (1) tahun dan denda paling banyak lima puluh juta rupiah (Rp.50.000.000,00).

2. Kendala dan upaya aparat kepolisian polresta surakarta dalam mengatasi pelaku tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang di lindungi secara ilegal di Surakarta.

Kendala dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang di lindungi secara ilegal terdapat banyak hambatan yang di hadapi Polresta Surakarta kendala dalam penanganan ini. Aipda Slamet Nuryanto, SH , Unit 5 Sat Reskrim Polresta Surakarta - Polda Jawa Tengah menyatakan bahwa terdapat banyak kendala yang terjadi dalam upaya mengatasi tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang di lindungi secara ilegal di Surakarta.

- a. Banyaknya pelaku yang semakin pintar bersembunyi :



Para pelaku tindak pidana perdagangan satwa dilindungi secara illegal pada saat ini semakin pandai dalam bersembunyi untuk memperdagangkan satwa stwa yang dijualnya karena sekarang sering diadakanya razia dan patroli yang dilakukan oleh anggota Polresta Surakarta untuk menekan banyaknya kasus perdagangan satwa secara illegal,para pelaku biasanya mendagangkan satwa satwa tersebut di online dan tertutup atau disebarkan dengan perorangan yang menyebabkan anggota Poltersta Surakarta sering kesusahan mencari informasi tersebut.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



- b. Kurangnya kesadaran dan kerjasama masyarakat terhadap pentingnya menjaga satwa yang dilindungi :

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga satwa yang dilindungi dapat mempengaruhi upaya penanganan perdagangan satwa liar secara ilegal. Jika masyarakat tidak memahami pentingnya perlindungan satwa liar, maka mereka lebih cenderung untuk terlibat dalam perdagangan satwa liar ilegal. Kurangnya kerjasama masyarakat dalam upaya mengatasi perdagangan satwa secara ilegal sangatlah dibutuhkan karena melalui masyarakat pihak kepolisian dapat menerima informasi lebih lanjut dan lebih banyak tentang pelaku tindak pidana perdagangan satwa secara ilegal, tetapi masih sangat banyak masyarakat yang acuh dan tidak terlalu peduli serta masih kurang paham tentang kasus pelanggaran hukum tindak pidana perdagangan satwa dilindungi secara ilegal, itu yang menyebabkan pihak kepolisian kesulitan dalam mendapat informasi terkait para pelaku pelanggaran tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal.

- c. Permintaan pasar yang tinggi :

Banyaknya permintaan pasar yang tinggi terhadap pemasaran satwa yang dilindungi untuk di koleksi dan di simpan maupun di awetkan semakin marak dan sulit dikendalikan di karenakan para pelaku pelanggaran tindak pidana menyimpan, memiliki, menyimpan, memperniagakan satwa yang dilindungi secara ilegal semakin banyak dan mempunyai tim tersendiri untuk melakukan pemasaran tersebut secara tersembunyi agar tidak ketahuan oleh pihak Polresta Surakarta.

- d. Kesulitan dalam mendapatkan bukti ;

Polresta Surakarta seringkali kesulitan untuk melakukan penangkapan, penggedahan, dan penyeragaman pelaku dikarenakan kurangnya barang bukti yang diperlukan untuk dijadikan alasan dilakukannya penangkapan para pelaku, karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa dilindungi secara ilegal dan tanpa surat izin resmi dari pemerintah, serta sulitnya mengumpulkan bukti karena sifat kejahatan atau pelanggarannya yang dilakukan secara tersembunyi dan diam-diam dan jaringan perdaganganyapun sangat terstruktur dan rapi sehingga menyebabkan Polresta Surakarta sulit dalam mengumpulkan bukti terkait pelanggaran tersebut.

Seperti yang tertulis di atas beberapa kendala yang dihadapi oleh Polresta Surakarta dari berbagai kendala yang ada tentu saja Polresta Surakarta



juga mempunyai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa dilindungi secara illegal di Surakarta yaitu sebagai berikut :

a. Meningkatkan Intelejen :

Meningkatkan intelegen merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Polresta Surakarta dalam menanggulangi para pelaku yang semakin pintar bersembunyi dalam memperdagangkan satwa dagangannya, maupun bersembunyi untuk mengamankan satwa-satwa yang di simpan maupun di pelihara secara illegal, para anggota Polresta Surakarta biasanya melakukan penyamaran, menyamar menjadi sesama konsumen atau pembeli satwa-satwa yang di jual para pelaku dan menyamar menjadi sesama pengoleksi satwa-satwa yang langka agar bias masuk ke jaringan tersebut dan mengumpulkan bukti-bukti pelanggannya agar segera di tindak lanjuti.

b. Sosialisasi dan Edukasi :

Melakukan sosialisasi dan edukasi Polresta Surakarta melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya melakukan pelanggaran tindak pidana memiliki, menyimpan, memelihara, memperniagakan satwa dilindungi secara illegal dan memberitahukan sanksi apa saja yang akan di dapatkan apabila melanggar dan memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya melestarikan keberagaman satwa yang ada di Indonesia agar tetap lestari dan dterjaga dengan baik.

c. Menindak tegas pelaku :

Dalam menanggulangi permintaan pasar yang semakin tinggi dalam perdagangan satwa langka dan pengoleksi satwa satwa langka yang dilindungi dengan cara illegal ,Polresta Surakarta akan menidak tegas para pelaku pelanggaran dan melakukan penangkapan serta penyergapan dan penyitaan barang bukti yang dimiliki oleh para pelaku dan melanjutkannya ke pengadilan agar mendapatkan sanksi yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 21 ayat 2. Bagi yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap pasal diatas maka bisa dipidana penjara hingga lima tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah. Sedangkan bagi yang lalai melakukan pelanggaran tersebut dapat dipidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak lima puluh juta rupiah

d. Koordinasi dengan pihak lain :



Polresta Surakarta dalam tugasnya menanggulangi tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa dilindungi secara illegal di Surakarta biasanya berkolaborasi dengan pihak-pihak lain seperti BKSDA(Balai Konservasi Sumber Daya Alam), Kejaksaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan komunitas-komunitas local para pecinta hewan dalam mengumpulkan bukti bukti pelanggaran yang ada agar dapat segera dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta dilanjutkan kedalam persidangan dan penerimaan sanksi kepada para pelaku pelanggaran.

Menurut pendapat penulis dalam melakukan wawancara dengan Aipda Slamet Nuryanto, SH., selaku anggota Unit 5 Sat Reskrim Polresta Surakarta - Polda Jawa Tengah tentang kendala yang dihadapi oleh Polresta Surakarta dalam menanggulangi tindak pidana terhadap menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang di lindungi secara illegal yang terjadi di Surakarta.

KESIMPULAN

1. Dalam kasus yang diteliti oleh penulis, bahwa Polresta Surakarta dalam upaya menanggulangi tindak pidana terhadap menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi secara illegal yang terjadi di Surakarta, Polresta Surakarta sudah melakukan segala upaya preventif dan respresif. Peran Kepolisian dalam hal ini sangatlah penting dikarenakan upaya-upaya pencegahan, penangkapan, penindakan dan kerjasama dengan pihak pihak lain seperti BKSDA, Kejaksaan, LSM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan upaya pemberitahuan kepada masyarakat tentang pentingnya melestarikan satwa-satwa langka yang ada di Indonesia serta memberitahukan sanksi-sanksi apa yang akan di dapat apabila melanggar tindak pidana tersebut sangatlah perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan secara terus menerus untuk dapat meminimalisir pelanggaran tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa dilindungi secara illegal, dan untuk melindungi kelestaria keanekaragaman hayati di Indonesia.
2. Melalui kasus yang diteliti oleh penulis, penulis menyimpulkan bahwa kendala yang didapatkan oleh Polresta Surakarta dalam menanggulangi tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang di lindungi secara illegal di Surakarta dikarenakan kurangnya



koordinasi serta bantuan dari masyarakat setempat, kurangnya informasi himbauan untuk masyarakat dan kurangnya pengawasan, maka perlunya upaya upaya lainnya untuk tetap bisa memberantas atau meminimalisir pelanggaran tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang di lindungi secara illegal di Surakarta yaitu dengan melakukan razia, patrol, pemberian informasi kepada masyarakat sekitar secara berkelanjutan, serta meningkatkan pengawasan serta penambahan personil dalam melakukan razia dan patroli yang sudah terjadwal dan memperkuat sinergi antar instansi dengan memanfaatkan teknologi yang sudah semakin canggih merupakan langkah langkah krusial untuk memecahkan masalah ini dan meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dan dapat melindungi keanekaragaman satwa-satwa yang tersebar luas di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. (Bandung:Citra Aditya).

Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemdanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentari), Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia , Yogyakarta.

Baharudin. 2001. Upaya dalam Menanggulangi Kejahatan. Jakarta : Adhitya Andrebina Agung.

Bernard L. Tanya. 2001. Penagakan Hukum dalam Terang Etika. Genta Publising. Yogyakarta.

Daud Silalahi, 1992, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Bandung, Penerbit Alumni.

Depertemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



JURNAL

- Ali, B. B., & Supriyanta, S. 2023. Rekonstruksi Hukum Pidana Materiil Pada Korporasi Dalam Tindak Pidana Perpajakan Di Indonesia, Research Fair UNISRI, Vol 7No 2.
- Angelina, R. Z., Suryawan, I. G. B., & Karma, N. M. S. 2019. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi, Jurnal Analogi Hukum, Vol 01 No1
- Arif, M. 2021. Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, Al-Adl: Jurnal Hukum, Vol 13 No 1.
- Aryani, E., & Triwanto, T. 2021. Penyuluhan Hukum tentang Kenakalan Remaja dan Penanganannya, Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol 4 Nol 3.
- Supriyanta, S. 2021. Sosialisasi undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol 5 No 2.
- Triwanto, T., & Aryani, E. 2020. Sosialisasi Tentang Penggunaan Media Sosial Yang Cerdas Dan Beretika, Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol 4 No 1a.

SKRIPSI

- MARULAK, E. S. 2010. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta (Doctoral dissertation, UAJY).
- Mustikaningtyas, A. S, 2019, Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Doctoral dissertation, UAJY.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



WEBSITE

Jateng.antaranews.com, “100-an satwa dilindungi di Solo diamankan”
<https://jateng.antaranews.com/berita/373194/100-an-satwa-dilindungi-di-solo-diamankan>.

Kompas, “ Perdagangan Satwa Liar Meningkatkan Selama Pandemi ”
<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/10/28/perdagangan-satwa-liar-meningkat-selama-pandemi>.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :